Profil Data Berbasis Gender

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PERKIMLH) Kabupaten Bengkayang

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan profil data berbasis gender yang komprehensif untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PERKIMLH) Kabupaten Bengkayang. Tujuannya adalah untuk menyediakan analisis mendalam yang dapat menjadi dasar bagi perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang lebih responsif gender. Dengan mengintegrasikan data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, serta data kualitatif dari berbagai laporan dan penelitian, profil ini mengidentifikasi kesenjangan gender yang sistemik dalam tiga pilar utama kewenangan Dinas PERKIMLH: perumahan, kawasan permukiman (khususnya air bersih dan sanitasi), serta lingkungan hidup.

Temuan kunci menunjukkan adanya paradoks dalam pembangunan gender di Bengkayang. Di satu sisi, indikator formal seperti Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan capaian yang tinggi. Namun, di sisi lain, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih jauh tertinggal, yang sebagian dapat diatribusikan pada beban kerja domestik yang tidak proporsional, diperparah oleh keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar yang layak. Laporan ini mengungkap bagaimana kegagalan dalam menyediakan perumahan layak huni, air bersih, dan sanitasi yang memadai secara langsung berdampak pada kesehatan, keamanan, dan peluang ekonomi perempuan.

Analisis mendalam mengidentifikasi beberapa isu kritis: (1) Persyaratan administratif dalam program bantuan perumahan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara tidak langsung menciptakan hambatan bagi perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan lainnya; (2) Lambatnya progres pencapaian target sanitasi layak berkorelasi kuat dengan tingginya prevalensi stunting dan risiko kesehatan ibu dan anak, menjadikan program sanitasi sebagai intervensi kesehatan publik yang krusial; (3) Peran vital perempuan dalam pengelolaan sampah domestik merupakan modal sosial yang belum dioptimalkan menjadi peluang ekonomi sirkular yang berkelanjutan; dan (4) Meskipun komitmen terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) telah dilembagakan melalui penganggaran, implementasinya dalam sistem monitoring dan evaluasi kinerja program masih sangat terbatas, ditandai dengan minimnya indikator kinerja yang terpilah gender.

Berdasarkan temuan tersebut, laporan ini merekomendasikan tiga langkah strategis utama. Pertama, mereformulasi kriteria dan mekanisme penyaluran program bantuan agar lebih inklusif gender, terutama dengan menciptakan jalur afirmasi bagi kelompok rentan. Kedua, mengintegrasikan target dan indikator kinerja terpilah gender ke dalam dokumen perencanaan (Renstra), perjanjian kinerja, dan pelaporan kinerja (LKj) Dinas PERKIMLH. Ketiga, memperkuat sistem pengumpulan data terpilah gender di tingkat dinas untuk memastikan

perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan didasarkan pada bukti yang akurat dan berkeadilan.

Bagian 1: Lanskap Pembangunan Manusia dan Kesetaraan Gender di Kabupaten Bengkayang

Untuk memahami secara utuh tantangan dan peluang berbasis gender dalam lingkup tugas Dinas PERKIMLH, analisis harus diawali dengan memetakan konteks sosio-ekonomi dan status kesetaraan gender yang lebih luas di Kabupaten Bengkayang. Kondisi makro ini tidak hanya membentuk lingkungan di mana program-program PERKIMLH beroperasi, tetapi juga dipengaruhi secara langsung oleh keberhasilan atau kegagalan dinas tersebut dalam menyediakan infrastruktur dasar yang berkeadilan. Bagian ini akan menguraikan profil demografi, capaian pembangunan manusia, serta potret partisipasi perempuan di berbagai sektor sebagai fondasi analisis selanjutnya.

1.1. Komposisi Demografi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan data publikasi "Kabupaten Bengkayang Dalam Angka", komposisi demografi menjadi titik awal yang fundamental. Data populasi yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur memberikan gambaran mengenai struktur masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan. Analisis rasio jenis kelamin juga penting untuk memahami keseimbangan demografis di wilayah ini.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkayang menunjukkan adanya modal dasar sumber daya manusia yang cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan signifikan untuk mencapai kategori "tinggi". Pada tahun 2021, IPM Bengkayang mencapai 67,65, menempatkannya dalam kategori "sedang". Capaian ini patut diapresiasi karena berada di atas rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Barat pada tahun yang sama. Hal ini menandakan bahwa dari sisi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, Bengkayang memiliki fondasi yang lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di provinsi tersebut. Namun, untuk mencapai target pembangunan yang lebih ambisius, diperlukan analisis lebih dalam terhadap komponen-komponen pembentuk IPM, seperti Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, untuk mengidentifikasi sektor mana yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat.

1.2. Analisis Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Salah satu temuan paling menonjol dari analisis data gender di Kabupaten Bengkayang adalah adanya sebuah paradoks pemberdayaan. Di satu sisi, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan capaian yang sangat positif. Pada tahun 2020, IDG Kabupaten Bengkayang mencapai 71,96%, sebuah angka yang tidak hanya tergolong tinggi tetapi juga melampaui capaian rata-rata Provinsi Kalimantan Barat. IDG yang tinggi ini secara teoretis mengindikasikan bahwa perempuan di Bengkayang telah memiliki tingkat partisipasi dan peran pengambilan keputusan yang relatif setara dengan laki-laki dalam tiga dimensi kunci: politik (keterwakilan di parlemen), ekonomi (kontribusi pendapatan), dan profesional (partisipasi sebagai tenaga profesional dan teknis).

Namun, gambaran optimis dari IDG ini berbenturan dengan realitas di pasar kerja. Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan kesenjangan yang sangat signifikan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2020, TPAK laki-laki mencapai 87,24%, sementara TPAK perempuan hanya 63,29%. Kesenjangan sebesar 24 poin persentase ini menandakan bahwa meskipun perempuan mungkin memiliki akses yang lebih baik ke ranah publik tertentu, partisipasi mereka dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan masih jauh tertinggal.

Kontradiksi antara IDG yang tinggi dan TPAK perempuan yang rendah ini mengisyaratkan bahwa pemberdayaan yang terukur oleh indikator formal mungkin belum sepenuhnya mentransformasi struktur sosial-ekonomi yang lebih luas. Kemajuan yang dicapai bisa jadi terkonsentrasi pada segmen perempuan berpendidikan di sektor formal, namun belum mencerminkan realitas mayoritas perempuan yang partisipasinya masih terhambat oleh berbagai faktor. Salah satu faktor penghambat utama adalah beban kerja domestik dan pengasuhan yang tidak proporsional, yang diperburuk oleh keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar. Ketiadaan akses mudah terhadap air bersih dan sanitasi layak, misalnya, secara langsung meningkatkan "kemiskinan waktu" (*time poverty*) bagi perempuan, mengurangi waktu dan energi yang seharusnya dapat mereka alokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif, pendidikan, atau partisipasi sosial. Dengan demikian, kinerja Dinas PERKIMLH dalam menyediakan infrastruktur dasar yang efisien dan merata memiliki implikasi langsung terhadap kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam angkatan kerja, sekaligus menjadi kunci untuk mengatasi paradoks pemberdayaan ini.

1.3. Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan, Ekonomi, dan Sektor Publik

Data partisipasi perempuan di berbagai sektor memperkuat analisis mengenai paradoks pemberdayaan. Di sektor publik formal, perempuan menunjukkan partisipasi yang kuat. Pada tahun 2020, dari total 4.145 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bengkayang, 51,9% di antaranya adalah perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap pekerjaan formal di lingkungan pemerintahan sangat baik dan bahkan melampaui laki-laki. Kualitas sumber daya manusia perempuan di sektor ini juga tergolong tinggi, dengan mayoritas (87,4%) memiliki latar belakang pendidikan tinggi (Diploma hingga Magister).

Akan tetapi, keberhasilan di sektor birokrasi ini tidak tereplikasi di ranah politik. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (DPRD) Kabupaten Bengkayang masih tergolong rendah, dengan hanya 6 dari 30 kursi (20%) yang diduduki oleh perempuan pada tahun 2020. Angka ini berada di bawah ambang batas kritis 30% yang dianggap perlu untuk dapat secara efektif menyuarakan kepentingan perempuan dalam proses legislasi, menunjukkan adanya "langit-langit kaca" (

glass ceiling) yang menghambat kemajuan perempuan di arena politik.

Di sektor ekonomi, peran perempuan masih perlu dioptimalkan. Meskipun TPAK perempuan meningkat, angkanya masih jauh di bawah laki-laki, yang mengindikasikan bahwa laki-laki masih menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Dari 53.789 perempuan yang bekerja pada tahun 2020, hanya sebagian kecil (13,5%) yang berstatus berusaha sendiri, dan jumlah perempuan yang memiliki usaha dengan dibantu buruh tetap maupun tidak tetap juga relatif kecil (22,2%). Data ini menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama sebagai wirausahawan, masih terbatas dan memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Tabel 1: Indikator Kunci Pembangunan Gender Kabupaten Bengkayang (2020)

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Total/Gabungan	Sumber Data
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (2021)	-	-	67,65	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	71,96	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	87,24%	63,29%	-	
Persentase Keterwakilan di DPRD	80,00%	20,00%	100%	
Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS)	48,10%	51,90%	100%	

Tabel di atas secara visual menyajikan "Paradoks Pemberdayaan" dalam satu tampilan, memudahkan pembuat kebijakan untuk melihat kemajuan di satu area (IDG, PNS) dan kesenjangan di area lain (TPAK, DPRD) secara bersamaan. Ini berfungsi sebagai alat diagnostik yang kuat untuk mengarahkan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Bagian 2: Analisis Gender Sektor Perumahan: Akses, Kelayakan, dan Bantuan

Perumahan bukan sekadar struktur fisik, melainkan pusat kehidupan keluarga yang fundamental bagi kesejahteraan, keamanan, dan produktivitas. Bagi perempuan, kualitas hunian memiliki dimensi yang lebih dalam, terkait erat dengan peran domestik, pengasuhan anak, serta kerentanan terhadap kekerasan. Bagian ini akan menganalisis isu perumahan di Kabupaten Bengkayang dari perspektif gender, dengan fokus pada kondisi kelayakan huni, aksesibilitas program bantuan, dan implikasinya terhadap perempuan dan keluarga rentan.

2.1. Potret Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Perspektif Gender

Masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan tantangan signifikan di Kabupaten Bengkayang. Data pada tahun 2018 mencatat terdapat 5.603 unit RTLH yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Data yang lebih baru menunjukkan adanya upaya intervensi melalui rencana rehabilitasi terhadap 1.306 unit RTLH, yang didanai melalui APBD dan APBN dengan total anggaran mencapai 21 miliar rupiah. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mengatasi masalah ini juga tertuang jelas dalam RPJMD 2021-2026, yang menargetkan penurunan persentase RTLH secara drastis dari 10,94% pada tahun 2020 menjadi 5,00% pada tahun 2026.

Meskipun data RTLH yang tersedia tidak terpilah berdasarkan jenis kelamin kepala rumah tangga, analisis berbasis gender dapat mengasumsikan bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan (*female-headed households*) memiliki kerentanan yang lebih tinggi untuk tinggal di RTLH. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor struktural, termasuk kesenjangan pendapatan, akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan aset, serta beban pengasuhan tunggal yang membatasi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam perbaikan

rumah. Oleh karena itu, setiap kebijakan penanganan RTLH harus secara proaktif mempertimbangkan kerentanan spesifik yang dihadapi oleh kelompok ini.

2.2. Evaluasi Aksesibilitas Program Bantuan Perumahan bagi Perempuan dan Keluarga Rentan

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk merehabilitasi RTLH. Program ini memberikan dana stimulan sebesar Rp 20 juta per kepala keluarga (KK), dengan rincian Rp 17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah pekerja. Implementasi program ini telah berjalan, seperti yang terlihat di Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, di mana 44 KK telah menerima manfaatnya.

Namun, di balik keberhasilan tersebut, terungkap adanya hambatan administratif yang signifikan dan berpotensi diskriminatif. Sebuah studi kasus dari lokasi yang sama menunjukkan bahwa sebuah keluarga pasangan muda gagal mendapatkan bantuan BSPS karena tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, seperti surat nikah adat, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). Persyaratan administratif yang kaku ini, meskipun pada dasarnya netral gender, dalam praktiknya dapat menciptakan hambatan sistemik yang secara tidak proporsional mengecualikan kelompok-kelompok paling rentan.

Perempuan kepala keluarga, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terpaksa meninggalkan rumah, pasangan yang menikah secara adat dan belum tercatat secara sipil, atau individu miskin lainnya seringkali menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam melengkapi dokumen-dokumen formal tersebut. Kebijakan yang mensyaratkan kelengkapan dokumen sebagai prasyarat mutlak, tanpa menyediakan mekanisme afirmasi atau pendampingan intensif, berisiko gagal menjangkau target sasaran utamanya, yaitu masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan demikian, program yang dirancang untuk membantu yang termiskin justru dapat mengecualikan mereka karena hambatan birokrasi yang tidak sensitif terhadap realitas sosial dan gender di lapangan.

2.3. Keterkaitan antara Kualitas Hunian dengan Kesejahteraan dan Keamanan Perempuan

Kualitas hunian memiliki hubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan dan keamanan perempuan. RTLH seringkali tidak memenuhi standar dasar keamanan, seperti ketiadaan pintu dan jendela yang dapat dikunci dengan baik, dinding yang rapuh, atau pencahayaan yang minim. Kondisi ini meningkatkan risiko kejahatan dan kekerasan, menempatkan perempuan dan anak perempuan dalam posisi yang sangat rentan, terutama pada malam hari.

Selain itu, RTLH umumnya tidak memiliki fasilitas sanitasi pribadi yang layak di dalam rumah. Ketiadaan toilet pribadi memaksa perempuan untuk menggunakan fasilitas umum atau tempat terbuka, yang tidak hanya mengancam privasi dan martabat mereka tetapi juga meningkatkan risiko pelecehan dan kekerasan seksual. Isu ini menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bengkayang, yang mencatat 29 kasus hingga September 2020. Angka ini mengindikasikan bahwa ranah domestik dan lingkungan sekitarnya belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman. Dengan demikian, penyediaan rumah layak huni melalui program PERKIMLH bukan hanya soal pemenuhan hak

atas tempat tinggal, tetapi juga merupakan strategi pencegahan kekerasan berbasis gender yang fundamental.

Tabel 2: Capaian dan Target Akses Layanan Dasar (Perumahan, Air Minum, Sanitasi) Sesuai RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal (2020)	Target RPJMD (2026)	Realisasi (2022)	Sumber Data
Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	10,94%	5,00%	-	
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak	49,01%	74,01%	45,35%	
Persentase Penanganan Sampah	10,93%	11,93%	15,00%	
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	-	-	60,92%	

Bagian 3: Dimensi Gender dalam Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak (WASH)

Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak (WASH - *Water, Sanitation, and Hygiene*) adalah hak asasi manusia dan merupakan fondasi bagi kesehatan publik, martabat, serta pembangunan ekonomi. Di Kabupaten Bengkayang, seperti di banyak wilayah lainnya, tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan air dan menjaga kebersihan rumah tangga secara tidak proporsional dibebankan kepada perempuan dan anak perempuan. Oleh karena itu, setiap kesenjangan dalam penyediaan layanan WASH memiliki dampak gender yang mendalam dan multidimensional, memengaruhi kesehatan, pendidikan, keamanan, dan peluang ekonomi mereka.

3.1. Kesenjangan Akses terhadap Sumber Air Minum dan Fasilitas Sanitasi Layak

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menetapkan target yang ambisius dalam RPJMD 2021-2026 untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Salah satu target utamanya adalah menaikkan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dari 49,01% pada tahun 2020 menjadi 74,01% pada tahun 2026. Namun, data realisasi menunjukkan tantangan yang signifikan dalam mencapai target ini. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjip) tahun 2022 mencatat bahwa realisasi rumah tangga bersanitasi layak baru mencapai 45,35%, jauh di bawah target tahunan sebesar 54,01%. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya perlambatan dalam implementasi program dan memerlukan perhatian serius.

Demikian pula halnya dengan akses air minum layak. Meskipun tidak ada data kondisi awal yang spesifik dalam RPJMD, LKjip 2022 menunjukkan realisasi sebesar 60,92%. Meskipun capaian ini melampaui target tahunan, angka absolutnya masih menunjukkan bahwa sekitar 40% rumah tangga di Bengkayang belum memiliki akses terhadap air minum yang layak. Data nasional dari BPS seringkali menyoroti disparitas yang tajam antara wilayah perkotaan dan

perdesaan dalam akses WASH, sebuah pola yang sangat mungkin tereplikasi di Bengkayang, di mana sebagian besar wilayahnya adalah perdesaan.

3.2. Dampak Beban Pengambilan Air dan Sanitasi Buruk terhadap Perempuan dan Anak Perempuan

Kesenjangan dalam akses WASH bukanlah sekadar angka statistik; ia memiliki wajah dan menanggung beban gender yang nyata. Laporan-laporan global secara konsisten menunjukkan bahwa ketika air tidak tersedia di rumah, perempuan dan anak perempuan adalah pihak yang paling sering memikul tugas berat untuk mengambilnya dari sumber yang mungkin jauh. Tugas ini tidak hanya menguras tenaga fisik tetapi juga waktu yang berharga. Waktu yang dihabiskan untuk mengambil air adalah waktu yang hilang untuk pendidikan, partisipasi dalam kegiatan ekonomi, merawat anak, atau sekadar beristirahat. Fenomena ini dikenal sebagai "kemiskinan waktu" (*time poverty*) dan merupakan salah satu penghalang terbesar bagi pemberdayaan ekonomi perempuan.

Lebih jauh lagi, sanitasi yang buruk dan ketiadaan toilet pribadi di rumah menciptakan risiko keamanan yang serius. Perempuan dan anak perempuan terpaksa harus menunggu hingga gelap untuk mencari tempat tersembunyi di luar rumah untuk buang air, sebuah praktik yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap pelecehan dan kekerasan seksual. Perjalanan menuju sumber air atau fasilitas sanitasi umum yang terisolasi juga membawa risiko serupa. Dengan demikian, penyediaan akses WASH yang aman dan dekat bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga isu perlindungan dan keamanan bagi perempuan.

3.3. Hubungan Kausalitas antara Kondisi WASH dan Indikator Kesehatan Perempuan (Stunting dan AKI/AKB)

Kinerja Dinas PERKIMLH dalam mencapai target sanitasi layak memiliki hubungan kausal yang kuat dan langsung dengan keberhasilan Dinas Kesehatan dalam mengatasi masalah kesehatan publik yang krusial, terutama stunting dan Angka Kematian Ibu (AKI) serta Angka Kematian Bayi (AKB). Kegagalan di sektor sanitasi secara langsung menciptakan krisis kesehatan yang bebannya paling berat ditanggung oleh perempuan dan anak.

Kabupaten Bengkayang menghadapi tantangan serius dalam prevalensi stunting. Meskipun data menunjukkan tren penurunan, dari 30,1% (SSGI) menjadi 20,7% (e-PPGBM), angkanya masih tergolong tinggi. Salah satu akar penyebab stunting adalah penyakit infeksi berulang, terutama diare, yang disebabkan oleh konsumsi air yang terkontaminasi dan lingkungan yang tidak saniter. Sanitasi yang buruk memungkinkan penyebaran patogen yang menyebabkan diare, yang pada gilirannya menghambat penyerapan nutrisi penting bagi pertumbuhan anak. Perempuan, sebagai pengasuh utama, berada di garis depan dalam menghadapi risiko ini, baik bagi diri mereka sendiri maupun anak-anak mereka.

Selain stunting, tingginya AKB di Bengkayang (74 kasus pada 2024) juga terkait dengan kondisi lingkungan. Faktor-faktor seperti infeksi pada masa neonatal dan rendahnya kesadaran ibu untuk mengakses layanan kesehatan dapat diperparah oleh kondisi sanitasi yang tidak memadai. Dengan demikian, setiap investasi yang dilakukan oleh Dinas PERKIMLH dalam program sanitasi dan air bersih harus dipandang sebagai intervensi kesehatan preventif yang

fundamental. Program-program ini bukanlah sekadar proyek konstruksi, melainkan "infrastruktur kesehatan" yang kritis untuk memutus mata rantai penularan penyakit, memperbaiki status gizi anak, dan melindungi kesehatan ibu.

Bagian 4: Perspektif Gender dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan pilar ketiga dari mandat Dinas PERKIMLH yang memiliki dampak signifikan dan seringkali berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Kualitas lingkungan, termasuk air, udara, dan tutupan lahan, secara langsung memengaruhi kesehatan dan beban kerja perempuan yang berperan sebagai manajer utama sumber daya rumah tangga. Di sisi lain, perempuan juga memegang peran kunci dalam praktik pengelolaan lingkungan di tingkat komunitas, sebuah potensi yang belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program formal.

4.1. Analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Dampaknya bagi Perempuan

Secara umum, kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bengkayang menunjukkan hasil yang positif. Laporan Kinerja Pemerintah tahun 2022 mencatat capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 98% dari target, yang dikategorikan "Sangat Memuaskan". Capaian ini didukung oleh hasil yang baik pada komponen-komponennya, seperti Indeks Kualitas Air (IKA) yang mencapai 105% dari target dan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang mencapai 101% dari target.

Meskipun angka agregat ini menggembirakan, dampaknya perlu dianalisis lebih dalam dari perspektif gender. Kualitas air yang buruk, misalnya, secara langsung memengaruhi perempuan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan air minum, memasak, dan mencuci, perempuan dan anak-anak mereka adalah yang pertama kali terpapar risiko penyakit yang ditularkan melalui air (*waterborne diseases*) jika kualitas sumber air menurun. Demikian pula, degradasi lahan atau tutupan hutan dapat memaksa perempuan untuk berjalan lebih jauh mencari kayu bakar atau sumber daya alam lainnya, menambah beban kerja harian mereka. Oleh karena itu, mempertahankan dan meningkatkan IKLH bukan hanya tujuan ekologis, tetapi juga merupakan investasi langsung untuk meringankan beban perempuan dan meningkatkan kesehatan keluarga.

4.2. Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sampah Domestik dan Potensi Ekonomi Sirkular

Di sektor pengelolaan sampah, Kabupaten Bengkayang menunjukkan kinerja yang melampaui target. RPJMD 2021-2026 menargetkan peningkatan persentase penanganan sampah dari 10,93% menjadi 11,93%. Pada tahun 2022, realisasinya bahkan mencapai 15%, atau 130,55% dari target tahunan. Keberhasilan ini kemungkinan besar diukur dari volume sampah yang berhasil diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang menunjukkan efisiensi dalam aspek teknis pengumpulan dan pengangkutan.

Namun, fokus pada aspek teknis ini seringkali mengabaikan peran vital namun "tak terlihat" (*invisible role*) yang dimainkan oleh perempuan dalam rantai pengelolaan sampah. Di tingkat

rumah tangga, perempuan adalah manajer utama sampah domestik. Merekalah yang setiap hari memilah, membersihkan, dan memastikan sampah dibuang. Peran informal ini merupakan modal sosial yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh program-program pemerintah.

Terdapat potensi yang terlewatkan untuk mengintegrasikan program pengelolaan sampah Dinas PERKIMLH dengan program pemberdayaan ekonomi perempuan yang sudah berjalan. Organisasi seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah lama aktif dalam membina kelompok-kelompok perempuan melalui program seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak dari kegiatan ini berpotensi melibatkan pemanfaatan sampah, seperti membuat kerajinan dari plastik daur ulang, mengolah sampah organik menjadi kompos, atau kegiatan ekonomi sirkular lainnya.

Dengan demikian, program pengelolaan sampah Dinas PERKIMLH dapat bertransformasi dari sekadar "mengangkut sampah" menjadi "mengelola sumber daya sampah". Dengan berkolaborasi dengan organisasi perempuan seperti PKK dan Dinas Koperasi & UKM, PERKIMLH dapat memfasilitasi pembentukan bank sampah atau unit usaha daur ulang berbasis komunitas yang dikelola oleh perempuan. Dukungan dapat berupa penyediaan pelatihan keterampilan, fasilitasi akses ke peralatan, permodalan, dan jaringan pemasaran. Pendekatan terintegrasi ini akan menciptakan solusi ganda: mengatasi masalah lingkungan sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi keluarga, secara langsung memberdayakan perempuan di tingkat akar rumput.

Bagian 5: Analisis Kebijakan dan Kinerja Dinas PERKIMLH Responsif Gender

Evaluasi terhadap dokumen kebijakan, perencanaan, dan pelaporan kinerja menjadi krusial untuk mengukur sejauh mana perspektif gender telah terinternalisasi dalam siklus manajemen pembangunan Dinas PERKIMLH. Bagian ini akan menelaah sinkronisasi program dengan RPJMD, meninjau capaian kinerja dan anggaran, serta mengidentifikasi praktik baik dan celah dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG).

5.1. Sinkronisasi Program PERKIMLH dengan Target RPJMD 2021-2026 Berbasis Gender

RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2026 telah mengamanatkan serangkaian program strategis yang menjadi tanggung jawab Dinas PERKIMLH. Program-program ini mencakup Program Pengembangan Perumahan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan Persampahan, serta Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Program-program ini secara langsung bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis daerah, seperti penurunan angka RTLH, peningkatan akses sanitasi dan air bersih, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Namun, analisis lebih mendalam terhadap dokumen RPJMD menunjukkan bahwa sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk program-program tersebut masih bersifat agregat dan netral gender. Sebagai contoh, target penurunan RTLH diukur dalam persentase total, tanpa ada target spesifik untuk rumah tangga yang dikepalai perempuan. Demikian pula, target akses sanitasi dan air bersih diukur per rumah tangga, tanpa membedah capaian berdasarkan komposisi gender dalam rumah tangga tersebut. Ketiadaan indikator terpilah ini menciptakan

"kebutaan gender" (*gender blindness*) dalam dokumen perencanaan tertinggi, sehingga menyulitkan pengukuran dampak program secara adil dan merata.

5.2. Tinjauan Kinerja dan Anggaran Program dalam Mendukung Kesetaraan Gender

Tinjauan terhadap Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2022 memberikan gambaran mengenai realisasi program dan anggaran. Program-program yang relevan dengan mandat PERKIMLH, seperti pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), telah diimplementasikan dan menunjukkan capaian yang bervariasi.

Salah satu temuan positif yang signifikan berasal dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2023. Dokumen ini secara eksplisit mencatat adanya alokasi anggaran untuk program "Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota" sebesar Rp 88.164.601, dengan realisasi mencapai 97,96% atau sebesar Rp 86.364.600. Adanya pos anggaran yang didedikasikan khusus untuk PUG menandakan adanya komitmen kelembagaan dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam pembangunan.

5.3. Identifikasi Praktik Baik dan Celah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)

Alokasi anggaran spesifik untuk PUG dapat dikategorikan sebagai praktik baik yang menunjukkan kesadaran dan komitmen politik. Ini adalah langkah awal yang fundamental untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang mendukung kesetaraan gender dapat terdani dan terlaksana.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan yang jelas antara komitmen administratif ini dengan implementasinya sebagai kerangka kerja analitis dalam siklus pembangunan. Keberadaan anggaran PUG belum diikuti dengan penerapan indikator kinerja terpilah gender secara sistematis dalam dokumen perencanaan (RPJMD) dan evaluasi (LKj). Hal ini menunjukkan bahwa PUG saat ini lebih banyak dipandang sebagai sebuah kewajiban administratif atau program terpisah, daripada sebagai sebuah lensa analisis yang harus diterapkan pada semua program pembangunan.

Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki alat ukur yang efektif untuk mengetahui apakah investasi infrastruktur yang masif di sektor perumahan, air bersih, dan sanitasi telah berhasil mengurangi kesenjangan gender atau justru melanggengkannya. Tanpa data dan target terpilah, mustahil untuk mengevaluasi apakah program BPS lebih banyak diakses oleh kepala keluarga laki-laki, atau apakah pembangunan jamban komunal telah benar-benar menjawab kebutuhan privasi dan keamanan perempuan. Kesenjangan antara "melakukan PUG" (menghabiskan anggaran) dan "menjadi responsif gender" (mengukur dan mencapai hasil yang adil bagi semua) merupakan celah strategis yang harus segera diatasi.

Bagian 6: Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

Analisis data berbasis gender terhadap sektor-sektor yang berada di bawah kewenangan Dinas PERKIMLH Kabupaten Bengkayang telah mengungkap serangkaian kesenjangan dan

tantangan yang sistemik. Meskipun terdapat kemajuan di beberapa area, dampak pembangunan belum terdistribusi secara merata dan seringkali belum menjawab kebutuhan spesifik perempuan. Bagian ini mensintesis temuan-temuan utama dan merumuskan rekomendasi strategis yang konkret dan dapat diimplementasikan untuk memperkuat program-program PERKIMLH agar lebih responsif gender, adil, dan efektif.

6.1. Sintesis Kesenjangan Gender Utama di Sektor PERKIMLH

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan empat kesenjangan gender utama yang memerlukan intervensi kebijakan segera:

1. **Eksklusi Akibat Hambatan Administratif:** Program bantuan perumahan (BSPS), yang seharusnya menasar kelompok termiskin, dalam praktiknya mengecualikan sebagian kelompok rentan—terutama perempuan kepala keluarga dan pasangan nikah adat—karena persyaratan administrasi yang kaku. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi struktural yang tidak disengaja.
2. **Beban Ganda Akibat Keterlambatan Layanan Dasar:** Lambatnya pencapaian target akses sanitasi dan air bersih layak secara langsung melanggengkan "kemiskinan waktu" dan beban kesehatan bagi perempuan. Keterkaitan yang kuat antara sanitasi buruk dengan tingginya prevalensi stunting dan risiko AKB menjadikan kinerja PERKIMLH sebagai determinan kritis bagi kesehatan publik.
3. **Potensi Ekonomi yang Belum Tergarap:** Peran perempuan yang dominan dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga merupakan modal sosial yang belum diintegrasikan dengan program ekonomi sirkular. Fokus teknis pada pengangkutan sampah telah mengabaikan peluang untuk menciptakan nilai tambah ekonomi melalui pemberdayaan perempuan.
4. **Implementasi PUG yang Bersifat Administratif:** Meskipun komitmen terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) telah dilembagakan melalui penganggaran, hal ini belum diterjemahkan ke dalam sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Ketiadaan indikator kinerja terpilah gender dalam dokumen perencanaan dan pelaporan inti menyebabkan "kebutaan gender" dalam mengukur dampak pembangunan.

6.2. Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Program Responsif Gender

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan serangkaian intervensi kebijakan yang terarah dan terukur:

- **Sektor Perumahan:** Merevisi petunjuk teknis pelaksanaan program BSPS di tingkat kabupaten. Revisi ini harus mencakup **mekanisme jalur afirmasi** bagi perempuan kepala keluarga, penyintas KDRT, dan kelompok rentan lainnya. Jalur ini harus disertai dengan **pendampingan intensif** dari petugas dinas atau tenaga pendamping masyarakat untuk membantu dalam proses pengurusan dokumen administrasi yang menjadi prasyarat.
- **Sektor Air Bersih dan Sanitasi:** Membentuk **Tim Kerja Lintas Sektor** yang terdiri dari Dinas PERKIMLH, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, serta Bapperida. Tugas utama tim ini adalah melakukan pemetaan bersama untuk **memprioritaskan pembangunan infrastruktur WASH di desa-desa yang menjadi lokus intervensi stunting**. Perencanaan dan penganggaran untuk program air bersih dan sanitasi harus disinkronkan dengan target penurunan stunting.

- **Sektor Lingkungan Hidup:** Menginisiasi program percontohan "**Desa Mandiri Sampah Berbasis Pemberdayaan Perempuan**" di beberapa desa. Program ini harus dirancang melalui kolaborasi erat antara Dinas PERKIMLH, Dinas Koperasi UKM, dan TP-PKK. Komponen program harus mencakup: (a) pelatihan manajemen bank sampah dan keterampilan daur ulang; (b) penyediaan bantuan peralatan dasar (mesin pencacah, alat kompos, dll.); dan (c) fasilitasi akses ke pasar untuk produk-produk hasil daur ulang.

6.3. Rekomendasi Penguatan Sistem Pendataan Terpilah Gender

Rekomendasi program tidak akan efektif tanpa didukung oleh sistem data dan evaluasi yang kuat. Oleh karena itu, langkah-langkah berikut bersifat fundamental:

- **Revisi Instrumen Pendataan:** Bapperida dan Dinas PERKIMLH harus segera merevisi seluruh formulir pendataan dan survei terkait perumahan, RTLH, serta akses layanan dasar. Instrumen tersebut **wajib mencakup variabel yang memungkinkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin kepala rumah tangga**, status perkawinan, dan komposisi anggota keluarga.
- **Integrasi Indikator Gender dalam Pelaporan Kinerja:** Laporan Kinerja (LKj) tahunan Dinas PERKIMLH harus diwajibkan untuk menyajikan **analisis capaian kinerja terhadap target terpilah gender** untuk minimal dua hingga tiga indikator program prioritas (contoh: persentase penerima BSPS perempuan, peningkatan akses sanitasi di desa lokus stunting). Ini akan mengubah PUG dari sekadar pos anggaran menjadi alat evaluasi yang strategis.

Tabel 3: Matriks Rekomendasi Penguatan Program PERKIMLH Responsif Gender

Isu/Kesenjangan Gender yang Teridentifikasi	Rekomendasi Kebijakan/Program	Unit Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan	Sumber Daya yang Dibutuhkan
Hambatan administratif dalam program BSPS mengecualikan perempuan rentan.	Merevisi Juknis dengan menambahkan jalur afirmasi dan pendampingan intensif bagi P-KK, korban KDRT, dan kelompok rentan lainnya.	Dinas PERKIMLH, Bagian Hukum Setda	- Adanya Peraturan Bupati tentang Juknis BSPS yang baru. - Persentase penerima manfaat BSPS dari kelompok rentan meningkat.	- Revisi Perbup. - Alokasi anggaran untuk pendampingan.
Lambatnya progres sanitasi berdampak pada tingginya stunting dan AKB.	Membentuk Tim Kerja Lintas Sektor untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur WASH di desa-desa lokus stunting.	Dinas PERKIMLH, Dinas Kesehatan PPKB, Bapperida	- Adanya SK Tim Kerja Lintas Sektor. - Peta prioritas pembangunan WASH yang sinkron	- Mekanisme koordinasi formal. - Sinkronisasi alokasi DAK Fisik Sanitasi dan DAK Non-sinkron

			dengan peta lokus stunting. - Penurunan prevalensi stunting di desa intervensi.	Fisik Kesehatan.
Potensi ekonomi perempuan dalam pengelolaan sampah belum dioptimalkan.	Menginisiasi program percontohan "Desa Mandiri Sampah Berbasis Pemberdayaan Perempuan" (Bank Sampah, Daur Ulang).	Dinas PERKIMLH, Dinas Koperasi UKM, TP-PKK	- Terbentuknya minimal 3 unit usaha pengelolaan sampah yang dikelola kelompok perempuan. - Peningkatan pendapatan anggota kelompok. - Penurunan volume sampah yang diangkut ke TPA dari desa percontohan.	- Kerjasama dengan TP-PKK. - Alokasi anggaran untuk pelatihan & peralatan awal. - Fasilitasi akses ke permodalan (KUR) dan pasar.
PUG masih bersifat administratif, belum menjadi alat analisis kinerja.	Mewajibkan penyajian data dan analisis terpilah gender untuk IKU prioritas dalam dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, dan LKj Dinas PERKIMLH.	Bapperida, Dinas PERKIMLH, Inspektorat Daerah	- Minimal 3 IKU dalam LKj PERKIMLH dilaporkan secara terpilah gender. - Adanya analisis dampak program terhadap perempuan dan laki-laki dalam narasi LKj.	- Revisi template dokumen perencanaan & pelaporan. - Pelatihan analisis gender bagi perencana di tingkat OPD.